



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 170 / SK - 79 / XII / 2017  
T E N T A N G  
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP  
PENCABUTAN ENAM PULUH DELAPAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-11/II/2017 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Fasilitasi Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 1999-2014 Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.408/HK-peruu/X/2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tahun 1999-2014;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menyetujui dan menetapkan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 20 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 20 Desember 2017 terhadap Pencabutan 68 (enam puluh delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui dan Menetapkan Pencabutan Peraturan Daerah sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017
- KEDUA : Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilampirkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pencabutan Enam Puluh Delapan Peraturan Daerah Nomor : 170 / SK – 71 /XI / 2017, tanggal 8 Nopember 2017

1. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Nama-Nama Jalan Dalam Daerah Tingkat II Kutai;
2. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Peraturan Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai;
3. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
4. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Izin Pengeboran, Pengembalian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
5. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Izin Bongkar Muat Barang Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
6. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Kerjasama Antar Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Kutai Kartanegara

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Pada Kecamatan Muara Jawa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Pada Kecamatan Kota Bangun;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Kecamatan Muara Badak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kutai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kabupaten Kutai;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Pemberian Perijinan Usaha Produsen Benih/Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Kutai;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pemberian Perijinan Usaha Perusahaan Penggilingan Padi/Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras dalam Wilayah Kabupaten Kutai;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2000 Tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Kutai;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Pematangan Hewan, Penjualan Daging Hewan Dan Usaha Pematangan Unggas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kabupaten Kutai;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Pengusaha Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Kutai;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan bukan Kayu Kabupaten Kutai;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Penugasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kutai
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemberian ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja WNA Pendetang;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Indonesia
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Badan Kesatuan bangsa & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Retribusi Angkutan Barang atau Alat Berat yang Melebihi Kelas Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Kutai Kartanegara;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta dan Sarana Kesehatan Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kabupaten Kutai Kartanegara.
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Retribusi Pendaftaran Pengusaha Kecil dan Menengah dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Usaha Industry dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pencabutan Perda Daerah Kab. Kutai No 37 tahun 2000 tentang Pengujian Mutu Secara Organoleptik pada Laboratorium Hasil Perikanan di Kabupaten Kutai;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi & Tata kerja DISDUKPIIL & KB Kabupaten Kutai Kartanegara;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Panti Asuhan Anak Kab. Kutai Kartanegara;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kutai Kartanegara No 9 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;

51. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Retribusi Pendaftaran Pengusaha Kecil dan Menengah dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi serta Pendaftaran Pengusaha Kecil dan Menengah dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Rekstrukturisasi Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
58. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Ijin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Pertambangan Batubara.
59. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Pada partai Kabupaten Kutai Kartanegara;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Izin Mendirikan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara;

64. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 tahun 2009 Penataan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Bersama di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
66. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu *dicabut sebagian pasal 14 sampai dengan pasal 18*;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah;
68. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 20 Desember 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

